

**ANALISIS PEMANFAATAN LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH
OLEH INTERNAL PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

TUGAS AKHIR

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Menyelesaikan Program Diploma IV (D - IV)
Politeknik Universitas Andalas*

Oleh

ROSIANA
06 096 026



**PROGRAM BEASISWA UNGGULAN
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
DIPLOMA IV AKUNTANSI PEMERINTAHAN
POLITEKNIK UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2009**

	No. Alumni Universitas	Rosiana	No. Alumni Fakultas
Foto hitam Putih ukuran 4 X 6	a) Tempat/Tgl.Lahir: Teluk Betung, 16/02/1973 b). Nama Orang Tua: H. Nurhasan Ali dan Hj.Wasilah c). Fakultas: Politeknik d). Jurusan: Akuntansi Pemerintahan e) NBP: 06096026 f). Tgl.Lulus: 27 Juli 2009 g) Predikat Lulus: Sangat Memuaskan h). IPK: 2,91 i) Lama Studi: 32 Bulan j) Alamat orang tua: Jl. Way Ketibung no. 44 Pahoman, Bandar Lampung		

Analisis Pemanfaatan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah oleh Internal Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
Tugas Akhir D IV oleh Rosiana. Pembimbing 1. Amy Fontanella, SE, Ak. 2. Eliyanora, SE, M.Ak, Ak

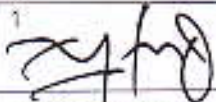

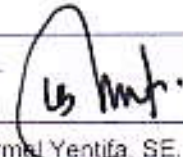
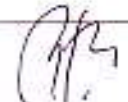
ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pemanfaatan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Responden ini adalah Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Asisten Bupati, dan Kepala-kepala Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD). Pertanyaan mendalam diajukan kepada setiap responden dimulai dari pemahaman terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah secara umum sampai kepada pemanfaatannya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Internal Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sebagai salah satu bagian dari pengguna laporan keuangan, belum memanfaatkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah secara optimal terutama dalam hal pengambilan keputusan. Pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan di Kabupaten Pesisir Selatan masih mempertimbangkan skala prioritas dan Rencana Kerja.

Tugas Akhir telah dipertahankan didepan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 27 Juli 2009. Abstrak telah disetujui oleh penguji:

Penguji:

Tanda Tangan	1 	2 	3 	4 
Nama Terang	Endrawati, SE, M.Kom, Ak	Ida Rosita, SE, MEc.ST, Ak	Arnel Yentifa, SE, Ak.	Amy Fontanella, SE, Ak

Mengetahui:
Ketua Jurusan Nurul Fauzi, SE, MM, Ak
Nama



Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas Andalas dan mendapat Nomor Alumnus.

Nomor Alumnus Fakultas	Nama	Tanda Tangan
Nomor Alumnus Universitas	Nama	Tanda Tangan

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Laporan keuangan pemerintah merupakan komponen penting untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas. Setiap organisasi publik mempunyai kewajiban menyediakan laporan keuangan sebagai alat pertanggungjawaban publik, baik itu di tingkat pusat maupun daerah. Namun laporan keuangan tidak hanya alat pertanggungjawaban, tetapi juga berfungsi memberikan dasar pertimbangan untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Jenis-jenis laporan keuangan pokok yang harus dibuat oleh pemerintah daerah adalah neraca, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan (Mahmudi 2007). Komponen dalam neraca yang antara lain adalah aset, hutang dan modal seharusnya dijadikan sebagai pertimbangan oleh internal pemerintah daerah. Aset mencerminkan kondisi kekayaan pemerintah daerah, dan potensi ekonomi sehingga dari informasi tersebut internal pemerintah daerah dapat menilai berbagai hal, neraca menginformasikan selengkap-lengkapnyanya kondisi keuangan daerah, baik posisi semua pos neraca (aset, utang, modal), realisasi anggaran, rentabilitas, likuiditas, *solvabilitas*, surplus/defisit dan sebagainya. Laporan realisasi anggaran digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dengan cara membandingkan anggaran dengan realisasinya

Laporan keuangan pemerintah daerah harus dipublikasikan dalam rangka memenuhi karakteristik transparansi. Menurut Mahmudi (2002), terdapat dua alasan

penting mengapa pemerintah daerah perlu mempublikasikan laporan keuangannya. Pertama bagi pemakai internal pemerintahan daerah yaitu: Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Asisten Bupati dan Kepala-kepala SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), laporan keuangan sebagai alat pengendalian dan evaluasi kinerja bagi pemerintah daerah secara keseluruhan maupun unit-unit kerja di dalamnya. Kedua bagi pemakai eksternal laporan keuangan pemerintah daerah merupakan bentuk pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada masyarakat, investor, kreditor, lembaga donor, pers, serta pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan laporan tersebut sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik.

Menurut Suhandi (2008), laporan keuangan pemerintah daerah bermanfaat untuk membantu internal pemerintah daerah dalam mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan, sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat.

Internal pemerintah daerah membutuhkan informasi keuangan sebagai komponen sistem pengendalian organisasi, pengukuran kinerja dan membandingkan kinerja pemerintah daerah antar kurun waktu dan dengan pemerintah daerah lain. Namun sayangnya hingga saat ini, masih banyak yang memiliki anggapan bahwa laporan keuangan hanya bermanfaat bagi pihak-pihak internal pemerintahan daerah yang memiliki pengetahuan akuntansi atau keuangan saja, sebab orang yang memiliki pengetahuan akuntansi lah yang dapat memahami dan menginterpretasikan angka-angka dalam laporan keuangan yang bukan berlatar belakang akuntansi tidak merasa bahwa laporan tersebut juga diperuntukkan bagi mereka, padahal laporan keuangan sebenarnya disajikan untuk memenuhi kebutuhan seluruh pengguna laporan dari berbagai latar belakang.

Internal pemerintah daerah masih berpandangan bahwa penyajian laporan keuangan hanya untuk memenuhi ketentuan perundangan saja. Laporan keuangan yang dipublikasikan belum benar-benar dimanfaatkan sebagai dasar pengambilan keputusan, bahkan seringkali keputusan yang dilakukan lebih banyak didasari oleh keputusan politis semata.. Dalam studi yang dilakukan oleh Illeana Steccolini (2002), dalam kajian tentang laporan keuangan tahunan pemerintah lokal Italia menunjukkan bahwa laporan keuangan yang dibuat oleh pemerintah daerah hanya bersifat formal untuk memenuhi kewajiban saja.

Kabupaten Pesisir Selatan adalah salah satu kabupaten di Sumatera Barat. Selama ini analisis pemanfaatan laporan keuangan pemerintah daerah oleh *stakeholder* di Indonesia khususnya Kabupaten Pesisir Selatan belum optimal, maka penulis tertarik untuk mengangkat topik ini dalam skripsi yang berjudul **"Analisis Pemanfaatan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah oleh Internal Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan"**

1.2 PERUMUSAN MASALAH

Dari uraian latar belakang tersebut penulis merumuskan sebuah permasalahan yaitu sejauh mana laporan keuangan Pemerintah Daerah di kabupaten Pesisir Selatan dimanfaatkan oleh pihak Internal Pemerintahan Daerah dalam pengambilan keputusan?

BAB LIMA

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dengan menggunakan objek penelitian pemanfaatan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah oleh Internal Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dan menjadikan Bupati, Wakil Bupati Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas dan Asisten menjadi responden dalam penelitian dengan menggunakan metode wawancara secara mendalam, diperoleh kesimpulan bahwa penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) baru merupakan pemenuhan persyaratan terhadap regulasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah belum dimanfaatkan secara optimal terutama dalam hal pengambilan keputusan. Pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan di Kabupaten Pesisir Selatan adalah skala prioritas dan Rencana Kerja (Renja).

5.2 SARAN

Pada akhir penelitian ini saran yang dapat penulis berikan kepada internal pemerintah daerah adalah:

1. Pemerintah daerah hendaknya dalam pembuatan laporan keuangan bukan hanya sebagai pemenuhan kewajiban terhadap peraturan perundang-undangan misalnya Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2005, Permendagri No. 13 tahun 2006 tetapi sebaiknya laporan keuangan juga menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesisir Selatan. Pesisir Selatan Dalam Angka (2007)
- Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 2008. Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- Halim, Abdul (2004). Akuntansi Keuangan Daerah: Salemba Empat, Jakarta
- Mahmudi (2007). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Salemba Empat, Jakarta
- Mardiasmo (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi, Yogyakarta
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004: Standar Akuntansi Pemerintahan
- Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2006: Sistem Informasi Keuangan Daerah.
- Purwanti (2005). Jurnal Akuntansi Indonesia
- Ratnawulan, Galuh. "Pemahaman Politisi Terhadap Anggaran dan Pelaporannya". Studi Kasus. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Jurnal Akuntansi Indonesia.
- Sadjiarto, Arja (2000). "Akuntabilitas dan Pengukuran Kinerja Pemerintah." Jurnal Akuntansi dan Keuangan.
- Suhanda (2008). "Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah". Andalas Lima Sisi. Padang
- Steccolini, Ileana (2002). *Local Government Annual Report: An Accountability Medium?*, Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004: Pemerintah Daerah.